



ISBN : 978-602-5548-14-7

PROSIDING

PROSIDING PENELITIAN

Tema:

“Penelitian Bidang Ekonomi-Bisnis Serta Pembangunan Masyarakat,
Dalam Upaya Meningkatkan Publikasi Internasional”



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**

Bandar Lampung, 11 Desember 2017

PROSIDING PENELITIAN

Karya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Copyrights © Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
All rights reserved

Desain Sampul: Zam-Zam Design
Tata Letak Isi: Zam-Zam Design

ISBN: 978-602-5548-14-7
Cetakan I, Desember 2017

Diterbitkan oleh:
ZAM-ZAM TOWER
Jl. Flamboyan III No. 35, Enggal, Bandar Lampung
(Anggota IKAPI)

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)

PROSIDING PENELITIAN

PELAKSANA

Penanggung Jawab	Prof Dr. Satria Bangsawan,S.E.,M.Si
Pengarah	Dr.Mahrinasari,S.E.,M.SBA
	Dr. Fajar Gustiawati Dewi, S.E.,M.Si., Akt
	Dr. Ambya, S.E.,M.Si
	Dr. Nairobi, S.E,M.Si
	Dr. Farichah, S.E,M.Si
	Dr.RR Erlina,S.E,M.Si
Pelaksana	
Ketua	Dr .Marselina, S.E, M.P.M
Sekretaris	Prayudha Ananta, S.E.,M.Si.
Bendahara	Emi Maimunah, S.E.,M.Si
Penyunting	Dr. Toto Gunarto, S.E,M.S
	Dr Erni Hendrawati, S.E.,M.Si
	Dr. Rindu Ekagamayuni, S.E, MSi, Akt
	Dr.Lies Maria Hamzah, S.E., M.E.
Forum Riset Ekonomi dan Bisnis	
<i>Bidang Kajian Ekonomi Pembangunan</i>	
Koordinator	Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si
Anggota	Zulfa Emalia, S.E., M.Sc
<i>Bidang Kajian Manajemen</i>	
Koordinator	Zainur M.Rusdi, S.E. , M.Si
Anggota	Yuniarti Fihartini, S.E., M.Si.
<i>Bidang Kajian Akuntansi</i>	
Koordinator	Dr Tri Joko Prasetyo, S.E.,M.Si
Anggota	Niken Kesumawardhani, S.E, M.Si, Akt

KATA PENGANTAR

Prosiding penelitian ini disusun berdasarkan hasil *Call For Paper* dan Seminar Nasional, 2017 yang mengangkat Tema “ Meningkatkan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis yang Berkualitas, Dalam Upaya Meningkatkan Publikasi Internasional, 2017 “.

Hasil penelitian yang berkualitas diperlukan dalam pembangunan nasional. Penelitian berkualitas akan melewati prosedur ilmiah secara benar, berdasarkan data yang diperoleh secara objektif, dilakukan terus menerus. Hasil penelitian yang berkualitas mempunyai nilai tambah yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun kebijakan. Dengan terselenggaranya *Call For Paper* dan Seminar Nasional 2017 ini, muncul penelitian-penelitian berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diselesaikan dengan bidang ilmu yang relevan. Penelitian yang berkualitas berpeluang besar untuk *published di* jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional bereputasi

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, para presenter, narasumber, editor serta seluruh panitia pelaksana *Call For Paper* dan Seminar Nasional, FEB 2017 ini, atas jerih payahnya sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik sampai tersusunnya prosiding ini. Akhir kata, semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 11 Desember 2017
Ketua Pelaksana

Dr. Marselina, S.E., M.P.M



DAFTAR ISI

PROSIDING PENELITIAN — iii

KATA PENGANTAR — iv

IMPLEMENTASI TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH DAN AKUNTABILITAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK MEMINIMALISASI TINGKAT KORUPSI
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Afrizal Nilwan, Syamsu Rizal, Indrayenti, Khairudin — 1

EVALUASI PENERAPAN GREEN GOVERNMENT DI PROVINSI LAMPUNG

Doni Sagitarian Warganegara, Lindrianasari — 7

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA)

Fegy Yuliant, Rindu Rika Gamayuni — 12

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN PADA
WEBSITE PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Risa Rikafitri, Lindrianasari, Agrianti Komalasari — 23

PENGARUH PENGUNGKAPAN (*DISCLOSURE*) TERHADAP BIAYA DANA
PERUSAHAAN

Tri Joko Prasetyo, Doni Warganegara, Marselina, — 29

HUBUNGAN AMNESTI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK BANDAR LAMPUNG

Yuliana — 35

ANALISIS SPASIAL EKONOMI DAN MIGRASI DI SUMATERA, JAWA, DAN BALI

Arivina Ratih — 39

DISPARITAS DAN KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI; STUDI DAERAH
OTONOM BARU (DOB) DI SUMATERA

Dr. Ambya, S.E., M.Si. — 46

POLA KONSUMSI MAHASISWA DI UNIVERSITAS LAMPUNG

Emi Maimunah, Julian — 53

PENGARUH SPASIAL KENAIKAN UPAH MINIMUM DI PASAR KERJA INDONESIA

Ida Budiarty — 61



EFEKTIFITAS PROGRAM PUMP PADA KUBE DI DESA KUSAMBA

Gusti Ayu Putu Wirathi, Surya Dewi Rustariyuni, Luh Putu Aswitari — 70

MODEL DATA PANEL UNTUK PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG,
FAKTOR-FAKTOR EKONOMI DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA
EMPAT NEGARA ASEAN

Irma Febriana MK — 85

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER, PDB, DAN FDI TERHADAP NILAI
EKSPOR INDONESIA

Nurbetty Herlina Sitorus, Grandtino Arganata — 93

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN NELAYAN: STUDI LAPANG DI
PESISIR PUGER JEMBER JAWA TIMUR

Siswoyo Hari Santosa — 99

TARIF JASA ANGKUTAN KOTA BERDASARKAN ABILITY TO PAY DAN
WILLINGNESS TO PAY PENGGUNA DI KOTA TARAKAN

PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDUSTRI MEUBEL KOTA DENPASAR
BERPENGARUH TERHADAP SOSIAL DEMOGRAFI?

Surya Dewi Rustariyuni, S.E.,M.Si — 117

ANALISIS PUSAT PERTUMBUHAN DAN WILAYAH HINTERLAND DI
KABUPATEN KLATEN

Dr. Unggul Priyadi, M.Si, Aulia Wahid Yudi Utama — 123

EXCHANGE RATES PASS THROUGH TO PRICES DURING THE IMPLEMENTATION
OF INFRATION TARGETING FRAMEWORK (2005:08-2017:03) IN
INDONESIA

Yoke Muelgini, Sonia Anggun Andini — 127

IDENTIFIKASI POTENSI IMPLEMENTASI INOVASI LAYANAN KEUANGAN
DIGITAL (LKD) DALAM PENGEMBANGAN UMKM DII PROVINSI
LAMPUNG 135

Yoke Muelgini dan Ria Pujianti — 135

DETERMINAN AGLOMERASI INDUSTRI MANUFAKTUR DI PROVINSI JAWA
BARAT

Zulfa Emalia — 145

PERAN BRAND IMAGE DALAM MEMEDIASI PENGARUH COUNTRY OF ORIGIN
TERHADAP NIAT BELI

A.A Diah Tarama Devi, Ni Wayan Ekawati — 152

PENERAPAN 8 LANGKAH PERUBAHAN ORGANISASI DARI KOTTER'S DALAM
RANGKA MENGEMBANGKAN INOVASI DI PT. POS INDONESIA UNTUK
MENJAGA EKSISTENSI DAN DAYA SAING PELAYANAN PUBLIK (STUDI
KASUS DI KANTOR POS JAKARTA UTARA 14000)

Agung Surya Dwianto, Pupung Purnamasari — 159

IDENTIFIKASI MARKET REGIME SEKTOR NON MANUFAKTUR PADA BURSA EFEK INDONESIA

Defrizal dan Hengky Achmad Subing — 167

PEMANFAATAN PENGARUH PERILAKU KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA SISTEM PEMBELIAN ONLINE DI KOTA PALEMBANG

Desi Apriyanty, Indra Satriadi, Sony Oktapriandi , Hetty Meyleni — 174

PENGARUH KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI PADA UNIVERSITAS SWASTA DI BANDARLAMPUNG.

Dra. Endang Siswati Prihastuti, MS — 185

PENINGKATAN KETERAMPILAN RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

I Gede Wardana, I Gede Sujana Budhiasa, I Made Jember — 193

EFEKTIFITAS PROGRAM PUMP PADA KUBE DI DESA KUSAMBA GUSTIAYU PUTU WIRATHI, SURYA DEWI RUSTARIYUNI, LUH PUTU ASWITARI PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL

Habibullah Jimad — 223

PERAN CITRA MEREK DALAM MEMEDIASI PENGARUH GREEN MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI PADA PRODUK SPA BALI TANGI)

I G. N. Satria Bramantha Rahmanda Putra, I Gede Ketut Warmika, Ni Made Rastini — 229

TOURISM CONTRIBUTION ON BALI PROVINCIAL ECONOMY AND ITS IMPLICATIONS ON SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT

I Made Wardana — 240

PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HOKI KANTOR PUSAT DENPASAR

I Putu Agus Yoga Pratama. A.A.A Sriathi, Ni Wayan Mujiati — 247

STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI BALI

I Putu Gde Sukaatmadja , Ni Nyoman Kerti Yasa, Henny Rahyuda — 256

LAYANAN JASA TRANSPORTASI ONLINE BERBASIS INTERNET SEBAGAI ALTERNATIF TRANSPORTASI DI KALANGAN MAHASISWA DI PALEMBANG

- Ida Wahyuningrum, M.Noval, Heni Madora, Yusniarti — 266**
PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, PERSEPSI MANFAAT, PERSEPSI HARGA,
DAN PEMASARAN INTERNET TERHADAP PEMESANAN ULANG
ONLINE HOTEL DI BALI
- Komang Agus Satria Pramudana, I Wayan Santika — 274**
KOMPARASI REKSADANA SAHAM PERUSAHAAN INVESTASI NASIONAL DAN
ASING DI INDONESIA
- Dr. Luh Gede Sri Artini, SE., M.Si1, A.A.Ayu Putri Utami — 284**
FAKTOR-FAKTOR RELASIONAL, TUGAS, DAN ORGANISASI PADA KINERJA
TENAGA PENJUAL DI BANDAR LAMPUNG
- Mirwan Karim, Yuniarti Fihartini — 291**
APAKAH NET PERFORMING LOANS (NPL) DIPENGARUHI OLEH SKALA
USAHA? (ANALISIS KREDIT UMKM PADA BANK PEMBANGUNAN
DAERAH)
- Muslimin, Dariyus — 303**
PERBANDINGAN PENGGUNAAN *FORWARD CONTRACT HEDGING* DENGAN
OPEN POSITION DALAM MEMINIMALISASI EKSPOSUR VALUTA ASING
PADA CV. SABI-SABI
- Ni Kadek Diah Dwi Sartika Yanti, Nyoman Triaryati — 310**
PENGARUH LOYALITAS, PRESTASI KERJA DAN KOMPETENSI KARYAWAN
TERHADAP PROMOSI JABATAN DI PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI
BALI
- Ni Komang Tri Astiti, A.A Sagung Kartika Dewi — 317**
STRATEGI PENGEMBANGAN SDM DAN KOMPENSASI SERTA PENGARUHNYA
TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA
KARYAWAN
- Nova Mardiana — 329**
PENGARUH STRES KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KOMITMEN
ORGANISASI KARYAWAN PBF. PT. BANYUMAS DENPASAR
- Putu Agus Yoga Ariawan1, A.A. Ayu Sriathi — 339**
PERAN PROFITABILITAS MEMEDIASI PENGARUH STRUKTUR MODAL,
PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP NILAI
PERUSAHAAN
- Putu Ayu Intan Permata Putri1 dan Ida Bagus Anom Purbawangsa — 351**
METODOLOGI PENELITIAN PENGARUH *MERCHANDISE*, *GERAI ATMOSFER*
DAN *RETAIL SERVICE* TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA UD.
COMPUTER CORNER, RIMO TRADING CENTRE DENPASAR
- Putu Dian Karmana1, Ni Ketut Seminari — 359**

INFLUENCE OF MERCHANDISE, ATMOSPHERE AND RETAIL SERVICE CUSTOMERS ON CUSTOMER SATISFACTION IN UD. COMPUTER CORNER, RIMO TRADING CENTER DENPASAR

Putu Dian Karmana¹, Ni Ketut Seminari — 359

PEMBERDAYAAN KARYAWAN, STRES KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL KARYAWAN

Putu Saroyini Piartrini — 369

PERAN MEDIASI DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA ORGANISASI. STUDI PADA KOPERASI DI KABUPATEN TABANAN

SuparthaWayan Gede, I Wayan Mudiarta Utama, I Komang Ardana — 378

PENGARUH FAKTOR EXTERNAL TRIGGER CUES, IMPULSE BUYING TENDENCY, INTERNAL CUES, DAN NORMATIVE EVALUATION TERHADAP ONLINE IMPULSE BUYING DI BANDAR LAMPUNG 386

Yuniarti Fihartini — 386

Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Pada Website Pemerintah Daerah di Indonesia

Risa Rikafitri, Lindrianasari, Agrianti Komalasari

Universitas Lampung

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan pada website pemerintah daerah di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah rasio pendapatan asli daerah, ukuran, tipe, umur administratif, dan pembiayaan utang pemerintah daerah. Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling pada pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia pada tahun 2012, 2013, dan 2015. Sebanyak 226 pemerintah daerah digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan pada website pemerintah daerah di Indonesia adalah rasio pendapatan asli daerah, tipe, dan umur administratif pemerintah daerah. Ukuran dan tingkat pembiayaan utang pemerintah daerah tidak menunjukkan pengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada website pemerintah daerah di Indonesia.

Kata Kunci: Website, rasio pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah, umur administratif pemerintah daerah, dan pembiayaan utang pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia beralih ke sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Penyerahan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari presiden kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah menjadikan masing-masing kepala daerah memiliki tanggungjawab untuk menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggarannya kepada pemerintah pusat.

Reformasi birokrasi yang selama ini berjalan telah menjadikan kebutuhan masyarakat akan transparansi pengelolaan pemerintah menjadi semakin luas. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi suatu bukti adanya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan tersebut. Badan publik diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Isu transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah semakin meningkat seiring dengan

terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh berbagai institusi negara. Selain itu, isu mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*) sebagai tujuan reformasi birokrasi juga mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab (*accountable*). Akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan semakin banyak penggunaan internet sebagai media penyampaian informasi, pemerintah memiliki insentif untuk memanfaatkan *website* dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Maka dari itu, kualitas pengungkapan informasi keuangan melalui internet menjadi isu yang penting (Novianty *et al.*, 2013).

Pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan merupakan suatu nilai lebih dalam efektifitas, efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pengungkapan di *website* pemerintah daerah. Moon (2002) menyatakan bahwa penggunaan *website* dan teknologi informasi juga merupakan aplikasi dari *e-government* yang akan memegang

peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan di masa mendatang. Riset di beberapa negara menunjukkan, salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan di internet (Laswad *et al.*, 2005).

Melakukan identifikasi terhadap karakteristik pemerintah daerah yang melakukan pengungkapan laporan keuangan di internet merupakan hal yang penting untuk mengetahui alasan pemerintah daerah tertentu dalam mengambil kebijakan melakukan atau tidak melakukan pelaporan keuangan di internet.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Laswad *et al.* (2005) yang melakukan penelitian di Selandia Baru dengan menggunakan variabel kompetensi politik, ukuran pemerintahan daerah, *leverage*, kekayaan pemerintah daerah, visibilitas pers dan tipe pemerintahan terhadap *internet financial reporting*.

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- i. Untuk mengetahui pengaruh rasio pendapatan asli pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan pada *website* pemerintah daerah.
- ii. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan pada *website* pemerintah daerah.
- iii. Untuk mengetahui pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan pada *website* pemerintah daerah.
- iv. Untuk mengetahui pengaruh umur administrasi pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan pada *website* pemerintah daerah.
- v. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan utang terhadap tingkat pengungkapan pada *website* pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 678 observasi. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria sebagai daerah kabupaten dan kota di Indonesia yang mempunyai laporan keuangan dengan anggaran dan realisasi belanja, kemudian kabupaten dan kota yang telah memiliki *website* dan dapat diakses pada saat periode

pengamatan pada November – Desember 2013, Desember 2014, dan Desember 2016.

Penelitian ini menggunakan model statistik yaitu regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui keakuratan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

OPERASIONAL VARIABEL : Tingkat pengungkapan pada *website* menunjukkan jumlah informasi yang disajikan pemerintah daerah di dalam situs resmi masing-masing daerah, baik kabupaten maupun kota. Jumlah pengungkapan pada situs resmi pemerintah daerah diukur dengan menggunakan instrumen indeks pengungkapan yang berisi beberapa poin dalam penelitian Aminah *et al.* (2016). Total pengungkapan yang akan digunakan terdiri dari enam poin, yaitu:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran/ produk hukum
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat/media interaktif
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik
- 6) Terdapat informasi penting lainnya, seperti potensi daerah, peluang investasi, kegiatan kepala daerah, lelang/tender terbuka, dll

Jumlah skor tiap-tiap pemerintah daerah akan ditentukan sesuai dengan pemenuhan kriteria dalam indeks pengungkapan.

Pendapatan asli daerah menunjukkan kemandirian suatu pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Pendapatan daerah yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah menghasilkan kinerja yang tinggi. Semakin tinggi kinerja pemerintah daerah, maka pengungkapan akan lebih banyak, begitu pula sebaliknya. Penelitian ini menggunakan rasio pendapatan asli seperti yang digunakan oleh Puspita dan Martani (2012) dengan membagi total PAD berbanding Total pendapatan pemerintah daerah.

Semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka pengungkapan yang semakin banyak bukanlah menjadi suatu kendala. Bahkan, pengungkapan di media internet dianggap sebagai tindakan yang memberikan kontribusi positif terhadap nilai

organisasi. Penelitian ini menggunakan total aset sebagai ukuran pemerintah daerah dimana variabilitas total aset ditransformasi dengan menggunakan natural logaritma Sumarjo (2010).

Tipe pemerintah daerah didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan daerah, yaitu apakah pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Pada daerah kota, heterogenitas populasi yang lebih kompleks memberikan insentif bagi pemerintah untuk melakukan pengungkapan yang lebih banyak. Penelitian ini menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Laswad *et al.* (2005), yaitu menggunakan variabel *dummy* dengan nilai 1 untuk pemerintahan kota dan nilai 0 untuk pemerintahan kabupaten.

Umur administratif pemerintah daerah didefinisikan sebagai seberapa lama pemerintah daerah ada. Hossain dan Hammami (2009) menyatakan bahwa organisasi yang sudah lama berdiri dianggap memiliki kemampuan yang baik untuk mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku dibandingkan dengan organisasi yang lebih muda atau baru didirikan, karena organisasi tersebut tidak memiliki *track record* sehingga hanya sedikit informasi yang diungkapkan. Pengukuran variabel umur administratif pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) dalam satuan tahunan berdasarkan penetapan pembentukan suatu pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang.

Rasio pembiayaan utang atau leverage merupakan proporsi besarnya utang dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Dengan adanya utang yang dimiliki pemerintah daerah, maka insentif untuk menyajikan laporan mengenai kinerjanya akan semakin besar. Penelitian ini menggunakan proksi pembiayaan utang yang digunakan Laswad *et al.* (2005) yaitu dengan membagi total kewajiban per total ekuitas.

Penelitian ini menggunakan model statistik yaitu regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui keakuratan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

HASIL

Tabel 1: Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		678
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.68395528
Most Extreme Differences	Absolute	.125
	Positive	.061
	Negative	-.125
Test Statistic		.125
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Hasil pengujian nilai normalitas data, besarnya nilai Kolmogorov-smirnov adalah 0,125 dan signifikan pada 0,000. Hal ini berarti H_0 ditolak yang berarti data residual terdistribusi tidak normal. Penelitian ini menggunakan asumsi *central limit theorem* di mana apabila jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian cukup besar, yaitu $n > 30$ maka asumsi normalitas dapat diabaikan (Gujarati, 2003). Dalam hal ini, pengujian asumsi klasik yang lainnya diabaikan.

Tabel 1: Hasil Statistik F

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	139.301	5	27.860	9.752	.000 ^b
Residual	1919.773	672	2.857		
Total	2059.074	677			

a. Dependent Variable: Y_trans
b. Predictors: (Constant), X5_LEV, X1_PAD, X4_AGE, X3_TYPE, X2_ASSET

Berdasarkan hasil uji F di atas, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 9,752 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari variabel bebas PAD, ASSET, TYPE, AGE, dan LEV secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada *website* pemerintah daerah.

Tabel 2: Uji Statistik Koefisien Determinasi

Model Summary ^b		
Model	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.061	1.69021

a. Predictors: (Constant), X5_LEV, X1_PAD, X4_AGE, X3_TYPE, X2_ASSET
b. Dependent Variable: Y_trans

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) di atas dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square adalah 0,061 menjelaskan bahwa sebesar 6,1% variasi tingkat pengungkapan pada website pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel bebas (independen) yaitu PAD, ASSET, TYPE, AGE, dan LEV, sedangkan sisanya sebesar 93,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini

Tabel 3: Hasil Pengujian Hipotesis

Coefficients				
Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	-1.653	2.796	-.591	.555
X1_PAD	1.121	.530	2.115	.035
X2_ASSET	.164	.100	1.638	.102
X3_TYPE	.459	.178	2.579	.010
X4_AGE	.013	.003	4.010	.000
X5_LEV	.943	.809	1.166	.244

a. Dependent Variable: Y_trans

Berdasarkan hasil pengujian regresi di atas diketahui bentuk persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = -1,653 + 1,121 \text{ PAD} + 0,164 \text{ ASSET} + 0,459 \text{ TYPE} + 0,0713 \text{ AGE} + 0,943 \text{ LEV} + \varepsilon$$

Persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan bahwa konstanta sebesar -1,653 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata tingkat pengungkapan pada website pemerintah daerah berkurang sebesar -1,653.

PEMBAHASAN

Rasio pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada website pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi akan menunjukkan kepada para *stakeholder*-nya bahwa mereka telah menghasilkan kinerja yang tinggi (Puspita dan Martani, 2012). Pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan dari kegiatan ekonomi pemerintah daerah menunjukkan tingkat kemandirian pemerintah untuk membiayai kegiatan operasionalnya sendiri. Berdasarkan penelitian Laswad *et al.* (2005), besarnya kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini mendukung Laswad *et al.* (2005) yang menemukan bahwa kekayaan asli pemerintah daerah berhubungan secara positif signifikan terhadap

pengungkapan yang lebih atas informasi keuangan pada situs resminya.

Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan pada website. Hal ini sejalan dengan Martani *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Setyaningrum dan Syafitri (2012) menemukan bahwa hubungan yang tidak signifikan ini dikarenakan aset yang dimiliki pemerintah daerah biasanya berjumlah sangat besar dan tidak diiringi dengan kemampuan yang memadai atas pencatatan aset sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini menjadi kendala untuk melaporkannya dalam laporan keuangan.

Selanjutnya, penelitian ini membuktikan adanya hubungan antara tipe pemerintah daerah dengan tingkat pengungkapan pada website. Pemerintah daerah kota dengan tingkat kemajemukan masyarakat yang lebih tinggi memiliki insentif untuk menciptakan suatu sistem keterbukaan kepada masyarakatnya. Styles dan Tennyson (2007) menyatakan bahwa kota-kota besar dengan tingkat pelayanan yang lebih tinggi cenderung menghasilkan website yang lebih canggih. Penelitian ini mendukung temuan Laswad *et al.* (2005) yang menyatakan bahwa tipe pemerintahan yang berbentuk kota yang penduduknya lebih besar dan beragam, situs pemerintah daerahnya lebih canggih dan lebih banyak informasi yang diungkapkan pada situsnya.

Keberadaan pemerintah daerah dengan umur yang relatif lebih lama menunjukkan tingkat kelembagaan yang lebih *mature*. Pemerintah daerah yang telah lama berdiri juga telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan organisasinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang menyebutkan pemerintah daerah yang telah lama berdiri memiliki pengalaman lebih banyak dan kemampuan dalam pengelolaan infrastruktur serta keuangan daerah yang lebih stabil untuk mengembangkan pemanfaatan internet.

Besarnya pembiayaan utang pemerintah daerah tidak menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk memberikan pengungkapan yang lebih. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah daerah tersebut cenderung mengambil kebijakan untuk mengurangi pengungkapan informasi agar tidak menjadi sorotan pemberi pinjaman (Rahman *et al.*, 2013). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Araujo dan Romero (2012).

KETERBATASAN

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan pada website pemerintah daerah dalam penelitian ini hanya terdiri dari lima variabel independen, yaitu rasio pendapatan asli daerah, ukuran, tipe, umur administratif, dan pembiayaan utang pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan karakteristik pemerintah daerah yang melakukan pengungkapan informasi pada website belum sepenuhnya dapat dijelaskan. Selain itu, penggunaan instrumen dengan sistem pemberian skor atas pengungkapan informasi pada website pemerintah daerah dilakukan hanya pada skala kuantitas dan tidak menilai kualitas informasi dari pengungkapan. Hal tersebut menyebabkan pengukuran atas pengungkapan informasi pada website belum mencakup informasi yang komprehensif mengenai praktik dan pengungkapan yang dilakukan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari rasio pendapatan asli daerah, ukuran, tipe, umur administratif, dan pembiayaan utang pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan pada *website* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2012, 2013, dan 2015 dengan menggunakan 678 pemerintah daerah sebagai sampel penelitian. Hasil pengujian dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pengungkapan pada *website* pemerintah daerah di Indonesia dipengaruhi oleh rasio pendapatan asli daerah, tipe, dan umur pemerintah daerah, sedangkan ukuran dan pembiayaan utang pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aminah, Lindrianasari, and Rosmiaty. 2016. *Good Government Governance and Opinions of The Audit Board of Republic Indonesia*. International Journal of Monetary Economics and Finance, Vol. 9, No. 2.
2. Araujo, J.F., and Tejedro-Romero, F. 2012. *Political and Economic Determinant of Information Transparency in Spanish Local Government*. The Fourth of Global Conference in Transparency Research: 1 - 17
3. Beattie, V., & Pratt, K. (2001). *Business reporting: Harnessing the power of the internet for users*. Edinburgh: Institute of Chartered Accountants of Scotland.
4. Craven, B., and Marston, C.1999. Financial Reporting on the Internet by Leading UK Companies.*The European Accounting Review* 8(2), 321-333.
5. Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Edisi 5. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
6. Ghozali, Imam. 2007. *Teori Akuntansi*. Edisi 3. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
7. Hendriyani, R. dan Tahar, A. 2015. Analisis Faktor-faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE.)* 22(1): 25 -33
8. Hossain, M. and Hammami, H. 2009. *Voluntary Disclosure in The Annual Reports of An Emerging Country: The Case of Qatar*. Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting.
9. Jensen, M.C. and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics. Volume 3, 305-360.
10. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2012. *Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government*. Deputi Bidang Tatalaksana.
11. Kusumawati, Dwi Novi. 2007. "Profitability and Corporate Governance Disclosure: An Indonesian Study", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 10, No. 2, Hal. 131-146
12. Laswad, F., Fisher, R. and Oyelere, P. 2005. *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. Journal of Accounting and Public Policy, 24, 101-121.
13. Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2 (1).
14. Martani, D., Nastiti, D., dan Wicaksono, P. 2014. *Disclosure of Non Financial Information About Public Services on the Official Website of Local Governments in Indonesia*. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. 66 (2): 500 – 512
15. Moon, M. Jae. 2002. *The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric or Reality?*. *Public Administration Review*, July/Agust, Vol 62 (4): 424 – 433.

16. Novianty, Risca, Budi Hermana, Avinanta Tarigan, dan Henny Medyawati. 2013. *Proceeding of the Second International Conference on Advances in Information Technology*.
17. Puspita, Rora dan Dwi Martani. 2012. *Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda*. Banjarmasin: Simposium Nasional Akuntansi 15.
18. Rahman, A., Sutaryo, dan Budiatmono, A. 2013. *Determinan Internet Financial Local Government Reporting in Indonesia*. Simposium Nasional ed Akuntansi XVI Manado. 1299 – 1323
19. Reddick, C. G. 2004. *A two stage model of e-government growth: Theories and empirical evidence for U.S. cities*. *Government Information Quarterly* Vol 21, 51 – 64.
20. Setyaningrum, D., dan Syafitri, F. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 9(2): 154 – 170
21. Serrano-Cinca, Carlos, Mar Rueda-Tomas, and Pilar Portillo-Tarragona. 2008. *Factors Influencing e-disclosure in Local Public Administrations*. Working Paper No.2008-02, Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales, Universidad de Zaragoza.
22. Spence, M. 1973. *Job Market Signaling*. *The Quarterly Journal of Economics*, 87 (3), 355 – 374.
23. Styles, Alan K., Mack Tennyson. 2007. *The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on The Internet*. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19 (1), 56 – 92.
24. Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. Vol. 13, No.1.
25. Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF
26. Zimmerman, Jerold L. 1977. *The Muncipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives*. *Journal of Accounting Research*. Vol. 15, 107 – 144.